

KPK Geledah Rumah

Dari Halaman 1

pengeledahan di rumah mantan anggota DPR dari NasDem Ahmad Ali. Tim penyidik KPK sebelumnya menggeledah rumah kediaman mantan Anggota DPR dari Fraksi NasDem Ahmad Ali, Selasa kemarin. Ditemukan dan disita dokumen, barang bukti elektronik, uang, tas, hingga jam tangan. Lembaga antirasuah menduga Rita telah menerima gratifikasi berkaitan dengan pertambangan batu bara, jumlahnya sekitar US\$3,3 hingga US\$5 per metrik ton batu bara. Rita diduga juga telah menyamakan penerimaan gratifikasi tersebut sehingga KPK menerapkan Pasal TPPU. Sejumlah aset yang disinyalir bersumber dari hasil korupsi masih terus didalami. Salah satu

upaya yang dilakukan adalah dengan memeriksa saksi-saksi. Pada Kamis, 27 Juni 2024, KPK telah memeriksa pengusaha asal Kalimantan Timur yang bernama Said Amin. Tim penyidik mendalami perihal sumber dana pembelian ratusan mobil yang telah disita sebelumnya. KPK juga telah memeriksa dan menggeledah rumah kediaman Direktur Utama PT Sentosa Laju Energy, Tan Paulin alias Paulin Tan, di Surabaya, Jawa Timur. Rita bersama Komisaris PT Media Bangun Bersama Khairudin ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada 16 Januari 2018. Rita dan Khairudin diduga mencuci uang dari hasil tindak pidana gratifikasi dalam sejumlah proyek dan perizinan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar Rp436 miliar.

Mereka disinyalir membelanjakan penerimaan hasil gratifikasi tersebut untuk membeli kendaraan yang menggunakan nama orang lain, tanah, uang tunai, maupun dalam bentuk lainnya. Rita kini mendekam di Lapas Perempuan Pondok Bambu untuk menjalani vonis pidana 10 tahun penjara. Berdasarkan putusan Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung (MA), Rita juga dihukum membayar denda sebesar Rp600 juta subsidier enam bulan kurungan dengan hak politik dicabut selama lima tahun, terhitung mulai dari yang bersangkutan selesai menjalani pidana pokok. Rita terbukti menerima gratifikasi sebesar Rp110,7 miliar dan suap Rp6 miliar dari para pemohon izin dan rekanan proyek. **(cnni/js)**

KPU Sumut Tetapkan Bobby Gubernur

Dari Halaman 1

Provinsi Sumut, Rabu (05/02/2025). Ketua KPU Sumut, Agus Arifin mengatakan, penetapan Paslon terpilih ini terkait dengan hasil dari tahapan Pilkada 2024 yang merupakan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 247/PHPU.Gub-XXIII/2025. Dimana kita ketahui bersama, pada tanggal 27 November 2024 masyarakat di Provinsi Sumut telah menentukan pilihannya dalam memilih calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut dengan datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Masih dikatakannya, dalam Pemilihan Gubernur Sumut (Pilgubsu) 2024 tersebut, Paslon nomor 2, Edy Rahmayadi – Hasan Sagala menggugat hasil Pilgubsu tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK). Hingga akhirnya MK memutuskan gugatan Paslon Nomor Urut 2, Edy Rahmayadi -Hasan tidak dapat dilanjutkan/ditolak. Pasca putusan MK Nomor 247/PHPU.Gub-XXIII/2025 inilah, KPU Sumut langsung menggelar Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan calon (Paslon) terpilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut tahun 2024 yang digelar di Hotel Mercure Jalan Perin-

dis Kemerdekaan, Kota Medan, Provinsi Sumut. KPU Sumut menetapkan Paslon Bobby Nasution – Surya sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut terpilih dengan perolehan 3.645.611 suara atau 64,46 persen dari total suara sah, "tutup Agus Arifin yang turut di dampingi para Komisiner KPU Sumut. Dalam penetapan Paslon terpilih tersebut KPU Sumut juga turut mengundang kedua Paslon, yakni Bobby Nasution – Surya dan Edy Rahmayadi – Hasan Sagala, Partai politik (Parpol) pengusung dan Forkopimda Sumut, KPU Kabupaten/Kota se Sumut dan Bawaslu Sumut. **(bes)**

Menteri Israel Bersumpah 'Kubur'

Dari Halaman 1

menyebut gagasan Trump itu sebagai "jawaban sebenarnya" terhadap serangan mematikan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023, yang memicu perang Gaza. "Rencana yang disampaikan kemarin (Selasa -- 4/2) oleh Presiden Trump adalah jawaban sebenarnya terhadap 7 Oktober," sebut Smotrich dalam pernyataannya via akun Telegram miliknya. "Kami sekarang akan berupaya mengubur secara definitif... gagasan berbahaya tentang negara Palestina," cetusnya. Belum ada tanggapan Otoritas Palestina atas pernyataan tersebut. Smotrich, yang memimpin Partai Religius Zionisme yang beraliran ultranasionalis dan merupakan bagian dari pemerintahan Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu ini, gemar menuai kontroversi dengan komentar-komentarnya dalam beberapa bulan terakhir.

Pada Agustus lalu, dia memicu kemarahan internasional dengan mengatakan bahwa dibenarkan untuk membuat dua juta warga Gaza kelaparan, demi membebaskan sandera-sandera Israel yang ditahan di daerah kantong Palestina tersebut. Dia menolak keras kesepakatan gencatan senjata Gaza, yang dikecamnya sebagai "kesalahan yang sangat serius" dan sama saja "menyerah kepada Hamas". **TRUMP AKAN AMBIL ALIH GAZA** Trump kembali menuai kontroversi ketika secara mengejutkan mencetuskan bahwa AS akan menguasai Jalur Gaza dan mengembangkannya secara ekonomi. Gagasan ini disampaikan Trump dalam konferensi pers bersama Netanyahu yang sedang berkunjung ke Gedung Putih. "AS akan mengambil alih Jalur Gaza, dan kami juga akan melakukan pekerjaan terhadapnya. Kami akan memilikinya dan bertanggung jawab untuk menjinakkan semua bom berbahaya yang belum meledak dan senjata

lainnya di lokasi tersebut," cetus Trump. "Meratakan area tersebut, dan membersihkan semua bangunan yang hancur. Meratakannya, menciptakan pembangunan ekonomi," imbuhnya. "Jika diperlukan, kami akan melakukan itu, kami akan mengambil alih area itu, kami akan mengembangkannya, menciptakan ribuan lapangan kerja, dan hal ini akan menjadi sesuatu yang sangat dibanggakan oleh seluruh Timur Tengah," sebut Trump. "Saya melihat posisi kepemilikan jangka panjang dan saya melihat hal itu membawa stabilitas besar di kawasan Timur Tengah," kata Trump, yang menyebut dirinya telah membahas hal ini dengan para pemimpin regional dan mereka mendukung gagasan itu. Saat ditanya siapa yang akan tinggal di sana nantinya, Trump mengatakan tempat itu bisa menjadi rumah bagi "warga dunia". Trump tidak menjelaskan lebih lanjut soal mekanisme dan dasar hukum apa yang akan digunakan AS dalam mengambil alih Jalur Gaza. **(det/js)**

Tarif BPJS Kesehatan Diprediksi

Dari Halaman 1

hitungan kami dan Bu Menkeu [Sri Mulyani] 2025 harusnya aman, di 2026 kemungkinan mesti ada adjustment [penyesuaian] dari tarifnya," kata Budi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (5/2). Budi mengatakan penyesuaian tarif iuran BPJS Kesehatan ini tak ada kaitannya dengan pemberlakuan kelas rawat inap standar (KRIS) mulai 30 Juni 2025. Ia beralasan biaya layanan kesehatan di Indonesia memang naik. "Karena layanan kesehatan kita naik. Yang berat-berat, jantung, stroke itu naik," ucapnya. Budi mengklaim belum mengetahui perkiraan

penyesuaian tarif iuran BPJS Kesehatan tahun depan. Ia mengatakan sedang menghitung penyesuaian tarif tersebut bersama Kemenkeu dan BPJS Kesehatan. "Saya minta waktu ke beliau nanti kalau hitung-hitungannya sudah pas, mau menghadap [Prabowo] dengan Menteri Keuangan untuk menjelaskan," ujar dia. Sebelumnya, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti telah memastikan aset neto BPJS Kesehatan masih sehat meski ada risiko defisit. Ia juga memastikan BPJS Kesehatan lancar membayar klaim rumah sakit pada 2025. Ghufron mengatakan kepercayaan publik yang tinggi dan pemakaian atau utilisasi layanan BPJS

yang semakin masif menjadi penyebab risiko defisit. Ia menuturkan kini sekitar 1,7 juta orang per hari menggunakan layanan tersebut. Adapun terkait kenaikan iuran, sebagaimana pada Peraturan Presiden (PP) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan disebutkan bahwa per dua tahun kenaikan iuran dibolehkan, tapi perlu dievaluasi terlebih dahulu. Kenaikan iuran atau tarif akan ditetapkan maksimum pada 30 Juni atau 1 Juli 2025. "Bisa naik, bisa tetap, ini kan skenario. Tapi kalau BPJS sebagai badan yang mengeksekusi, bukan yang bikin regulasi ya," kata Ghufron. **(cnni/js)**

Zulhas Pastikan Stok

Dari Halaman 1

per kilonya sekitar Rp30 ribu, masih di bawah harga ecer." ujar Zulhas di Pasar Klender, Jakarta, Rabu (5/2). Selain ayam, harga bawang dan cabai juga masih dalam kisaran yang wajar. "Cabai masih Rp60 ribu, bawang Rp40 ribu, sesuai dengan harga eceran kita," tambahya. Tak hanya memantau harga bahan pokok, Zulhas yang juga Ketua Umum Partai Amanat

Nasional (PAN) mengecek ketersediaan Gas LPG 3 kg di pasar tersebut. Menurutnya, saat ini masyarakat sudah lebih mudah mendapatkan gas subsidi tersebut. Kemudahan ini, kata Zulhas, berkat instruksi Presiden Prabowo Subianto yang meminta agar pengecer kembali diperbolehkan menjual Gas LPG 3 kg. "Alhamdulillah soal gas sudah lancar kembali normal setelah ada perintah Bapak Presiden dikembalikan seperti semula," ujarnya. Sementara terkait kesiapan bulan Ramadan,

Zulhas mengatakan pihaknya tengah berupaya untuk menjaga stok minyak goreng dan komoditi pangan lainnya. Hal itu bertujuan agar bahan pangan sepanjang Ramadan tidak terjadi kelangkaan. "Sebentar lagi bulan Ramadan yang agak riskan itu kan minyak goreng dan gas itu kan menyangkut hajat hidup banyak orang. Memang harus kita perhatikan betul. Maka dari itu jangan sampai ada main-main soal gas, soal minyak goreng, cabe, gula, apa lagi menjelang Lebaran," ujar Zulhas. **(cnni/js)**

Jaksa Agung Beberkan

Dari Halaman 1

2023 di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Rabu (5/2/2025). Burhanuddin menjelaskan kebanyakan terpidana mati merupakan warga asing dengan kasus narkoba. Di antaranya berasal dari Eropa, Amerika, dan paling banyak Nigeria. Proses hukum tersebut harus berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri karena mempertimbangkan hubungan dengan negara lain. "Kita pernah beberapa kali bicara waktu itu masih menteri luar negerinya ibu (Retno Marsudi), 'Kami masih berusaha untuk menjadi anggota ini, anggota ini, tolong jangan dulu nanti kami akan diserangnya nanti,'" kata dia. Burhanuddin menuturkan pemerintah juga mempertimbangkan nasib WNI jadi terpidana mati di luar negeri. Menurutnya, ada perhitungan-perhitungan yang sampai saat ini belum menemukan titik terang. "Begitu selesai kami coba minta keringanan, karena kalau kayak China. Saya bilang, China bagaimana kalau kami eksekusi. Kebetulan di sana eksekusi mati masih berjalan. Apa jawabnya bu menteri pada waktu itu? 'Pak kalau orang China dieksekusi di sini, orang kita di sana akan dieksekusinya'," ungkapnya. "Jadi memang sangat-sangat saya bilang capek-capek kita udah nuntut hukuman mati nggak bisa dilaksanakan. Itu mungkin problematika kita," sambung dia. **(dt/js)**



Beredar Kabar

Dari Halaman 1

nih? Anggaran dipotong, THR enggak dapat pulak. Terus pemerintah mau muter roda ekonomi pakai cara apa?" tulis netizen dengan akun @S*b*tB*nd*r. Netizen lainnya, @eD*ulf**ar, juga mengaku mendengar kabar gaji ke-13 dan 14 PNS bakal dihapus. Ia khawatir ASN bakal menahar belanja imbas gaji-13 dan THR mereka dihapuskan. "Keluarnya rumor yang katanya gaji 13 dan 14 enggak bakal dibayar aja bikin geger PNS hingga banyak yang ikut mengurangi spending buat jaga-jaga biaya Ramadhan dan Lebaran besok," katanya. Sementara itu, netizen dengan akun @m*nir**ma menyinggung bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani pernah mengatakan bahwa gaji ke-13 dan 14 bisa menumbuhkan perekonomian nasional karena bisa meningkatkan daya beli masyarakat. "Setahuku Ibu SM (Sri Mulyani) sendiri loh yang bilang tahun kemarin kalau gaji 13 dan 14 bisa menumbuhkan perekonomian nasional karena otomatis masyarakat pada belanja dan UMKM terbantu," katanya.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI) Kemenkeu Deni Surjantoro mengaku belum mendapatkan informasi soal penghapusan gaji ke-13 dan 14 PNS saat dikonfirmasi CNNIndonesia.com. Ia belum bisa berkomentar soal isu viral tersebut. Presiden Prabowo memang melakukan pemangkasan besar-besaran pos APBN 2025. Pemangkasan tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang diterbitkan Prabowo pada 22 Januari. Prabowo ingin APBN tahun ini hemat Rp306,69 triliun.

Dua hari berselang, Menteri Keuangan Sri Mulyani menerbitkan Surat Nomor S-37/MK.02/2025. Surat itu merinci 16 pos belanja yang harus dihemat pimpinan di Kabinet Merah Putih senilai Rp256,1 triliun.

Pemotongan paling besar menyasar alat tulis kantor (ATK), yakni mencapai 90 persen. Sri Mulyani memberi tenggat waktu pelaporan efisiensi kepadanya paling lambat 14 Februari 2025, setelah dibahas dan disetujui DPR RI.

Sri Mulyani mengakui Prabowo harus menghemat Rp306 triliun demi pelbagai program, di antaranya adalah makan bergizi gratis atau dikenal sebagai MBG.

"Presiden (Prabowo) menyampaikan dalam instruksi untuk melakukan fokus anggaran agar makin efisien dan penggunaan anggaran akan ditujukan kepada langkah-langkah yang memang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat langsung, seperti Makan Bergizi Gratis," kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Hasil Rapat Berkala KSSK I 2025 di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (24/1). **(cnni/js)**



Retorika Ekstrem Donald Trump

Dari Halaman 1

bertanggung jawab" dan menegaskan bahwa mereka tidak akan membiarkan pihak manapun menduduki tanah mereka atau memaksakan perwalian pada rakyat Palestina.

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menyambut baik proposal tersebut dan memuji Trump sebagai "sahabat terbaik Israel di Gedung Putih".

Banyak negara dan organisasi internasional mengkritik rencana ini karena dianggap melanggar hukum internasional dan resolusi PBB, serta berpotensi meningkatkan ketegangan di kawasan Timur Tengah.

Rencana ini menandai perubahan signifikan dalam kebijakan AS terhadap konflik Israel-Palestina, yang selama ini mendukung solusi dua negara. Relokasi paksa penduduk dan pengambilalihan wilayah secara sepihak berpotensi menimbulkan konflik baru dan memperburuk situasi kemanusiaan di kawasan tersebut.

Selain itu, keberhasilan rencana ini diragukan mengingat penolakan dari negara-negara Arab untuk menerima pengungsi Palestina dan resistensi dari komunitas internasional terhadap langkah-langkah yang dianggap melanggar hak asasi manusia.

Secara keseluruhan, pernyataan Presiden Trump tentang mengambil alih Jalur Gaza telah memicu kontroversi dan menimbulkan kekhawatiran akan dampaknya terhadap stabilitas dan perdamaian di Timur Tengah.

Sebagai seorang politisi yang dikenal dengan gaya komunikasinya yang langsung, provokatif, dan populis, pernyataan Trump tentang Gaza mencerminkan beberapa strategi komunikasi politik. Trump mencoba membingkai masalah Gaza sebagai krisis yang memerlukan intervensi AS, dengan tujuan mengontrol narasi global. Ini juga bisa menjadi bagian dari upaya untuk menarik dukungan dari kelompok pro-Israel di AS.

Meskipun Trump berbicara tentang pengambilalihan Gaza, pesan ini dapat dipahami sebagai upaya mengukuhkan dukungan politik dari basis konservatifnya, terutama kalangan Evangelis Kristen dan kelompok pro-Israel.

Pernyataan ini juga dapat dilihat sebagai sinyal politik kepada Israel dan negara-negara sekutu AS bahwa Washington akan tetap berada di pihak mereka dalam konflik Palestina-Israel.

Dengan mengusulkan "pengambilalihan" Gaza, Trump seakan-akan menegaskan bahwa AS tidak lagi mendukung solusi dua negara dan lebih condong ke kebijakan pro-Israel.

Negara-negara Arab seperti Mesir, Yordania, dan Arab Saudi kemungkinan melihat pernyataan ini sebagai ancaman terhadap stabilitas regional. Komunikasi politik ini dapat memperburuk ketegangan antara AS dan dunia Muslim.

AS bisa kehilangan kredibilitasnya sebagai mediator konflik jika terlihat terlalu berpihak kepada Israel. Pernyataan seperti ini dapat memperburuk hubungan dengan organisasi internasional seperti PBB dan negara-negara yang mendukung Palestina.

Meskipun pernyataan Trump terdengar provokatif dan tidak konvensional, tidak ada indikasi bahwa itu disampaikan sebagai bentuk candaan atau akibat dari kepanikan. Sebaliknya, pernyataan tersebut tampaknya merupakan bagian dari strategi komunikasi politik Trump yang sering kali menggunakan retorika ekstrem untuk menarik perhatian dan menggeser paradigma kebijakan yang ada. Namun, tanpa tindakan konkret yang mengikuti pernyataan tersebut, sulit untuk menilai sejauh mana keseriusan dan implementasi dari ide tersebut.